

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga mengubah hubungan¹ antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak karena produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih.² Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm 4.

kemampuannya.³ Perdagangan dan transaksi bisnis tersebut sangat erat kaitannya dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang dan/ atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/ atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.⁴ Hubungan tersebut terjadi karena memang keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.⁵ Dalam setiap hubungan hukum (perdata) terbuka kemungkinan terjadinya sengketa, terutama disebabkan keadaan dimana pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak yang lainnya dalam hubungan tersebut.

Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M(alm) menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak untuk

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 1.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

berbuat demikian.⁶ Karena seringnya terjadi perselisihan antara Pelaku usaha dan Konsumen dalam menjalankan bisnis di Indonesia menyebabkan pemerintah memberikan perhatian khusus dan berupaya untuk mencegah, menanggulangi serta mengatasi sengketa yang mungkin saja terjadi. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) merupakan salah satu perwujudan dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai kecurangan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha, mengingat pada zaman milenial sekarang ini banyak kemungkinan kecurangan yang terjadi dan diharapkan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat semakin cerdas dalam menyikapi segala tindak kecurangan ataupun kejahatan yang terjadi yang dapat merugikan para pihak.⁷

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise

⁶ Hendarmin Djarab, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Mengenang Almarhum {Prof.Dr.Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.})*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 3.

⁷ Titia Tauhiddah, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, Vol.5. No. 01, hlm. 95.

jconsumerism).⁸ Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya⁹kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam petrlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.¹⁰ Dalam perlindungan konsumen, sendi utama pengaturannya adalah pada kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan pelaku usaha baru memiliki arti apabila juga terdapat keberadaan konsumen. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sendi-sendi pengaturan di bidang usaha, yaitu hak berusaha yang sama bagi setiap orang dan kepentingan konsumen merupakan tujuan akhir. Namun fenomena yang tampak adalah kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang terlemah. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan terjadi perselisihan atau sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam mempertahankan hak-hak konsumen diatur pada pasal 45 UUPK, yang menyebutkan hak-hak konsumen diatur

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia, 2013, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 22.

pada pasal 45 UUPK, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.¹¹ Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (win-lose). Putusan tersebut memberikan keuntungan bagi satu pihak sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian. Sementara itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang-menang (win-win solution). Putusan tersebut merupakan putusan yang sama-sama memberikan keuntungan bagi para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang relatif cepat. Waktu yang relatif lama pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi akan berdampak pada biaya selama proses penyelesaiannya yang relatif mahal, sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biaya yang diperlukan cenderung relatif murah dibandingkan dengan litigasi. Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling disukai oleh

¹¹Kurniawan, *Penyelesaian Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK)*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Vol.12, Januari 2012, No.1, hlm. 161.

para pelaku bisnis karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis serta efektif dan efisien dalam proses penyelesaiannya guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Secara khusus penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.¹²

Sebagai Badan perlindungan, BPSK mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.¹³ Berdasarkan Keputusan Menteri

¹² Nedi Rinaldi, *Peranan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Payakumbuh Terhadap Sengketa Konsumen*, Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Vol.4, No 2, Maret 2019, hlm. 323.

¹³Lihat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf a 5 menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. Melalui ketiga cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan win-win solution bagi para pihak.

Meskipun BPSK bukan pengadilan lebih tepat disebut peradilan semu tetapi keberadaannya bukanlah sekadar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut," tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (one-sided standard form contract) oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip *res judicata pro veritate habetur*, menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut, putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang

mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde). Namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK para pihak ternyata dapat mengajukan “keberatan” kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan pasal- pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien.¹⁴

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi antara PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan Mariana, awal mula kasus ini bermula dikarenakan perusahaan asuransi yang menolak/tidak ingin membayar klaim asuransi kerugian, Mariana sebagai tertanggung asuransi mengalami musibah yakni terjadi pencurian di tokonya yang sampai terjadi tiga kali yaitu pada tanggal 30 November 2010, 18 April 2011, 23 April 2011 yang menyebabkan Mariana mengalami kerugian yang sangat besar, lalu Mariana melaporkan PT.Allianz Utama Indonesia Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru karena PT.Allianz Utama Indonesia tidak ingin membayar klaim asuransi kepada Mariana. BPSK telah memutuskan sengketa tersebut dengan putusan Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 yang menghukum PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Mariana. Setelah itu PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus secara garis besarnya menolak permohonan keberatan dari PT.Allianz, memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015, dan menghukum pemohon keberatan, yaitu PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk mengganti atau membayar kerugian yang dialami oleh Mariana.

Tidak cukup sampai disitu, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia nampaknya tidak puas dengan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dari PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melanjutkan perkara sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, lalu Mahkamah Agung memutus untuk Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr tanggal 6 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Nomor 10/Pts/BPSK/I/2015. Perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan dibawahnya inilah yang membuat penulis tertarik apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbeda, padahal putusan Majelis BPSK telah memenangkan Mariana dan pengadilan negeri telah menguatkan putusan dari BPSK.

Dalam hal ini mungkin hakim Mahkamah Agung berpendapat lain terhadap sengketa tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa asuransi ini tentu telah menimbulkan pertanyaan tentang Kepastian Hukum mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehubungan dengan fakta tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya obyek penelitian. Obyek yang akan dikaji adalah berkaitan dengan putusan nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr Jo putusan nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 yaitu sengketa klaim asuransi yang terjadi antara PT.Allianz utama Indonesia dan Mariana. Dalam hal ini penulis akan menelaah lebih jauh dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“Kewenangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Penolakan Klaim Asuransi (Studi Perkara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana Dalam Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr Jo Putusan Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa perkara penolakan klaim asuransi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan Mariana merupakan sengketa konsumen?
2. Apa alasan yang mendasari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkara penolakan klaim asuransi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan Mariana bukan merupakan sengketa konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui Alasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perkara Asuransi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan Mariana merupakan sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Untuk mengetahui Alasan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkara penolakan klaim asuransi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dan Mariana merupakan sengketa konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi acuan dan bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang sejauh mana kewenangan Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK) dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara penolakan klaim asuransi.
 - b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya .

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan masukan oleh :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga proses penyelesaian tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2. Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa lembaga asuransi secara khusus dan masyarakat yang mengalami atau terlibat dalam sengketa perjanjian asuransi, agar apabila mengalami kasus atau permasalahan yang sama dapat mengacu pada penelitian ini sehingga permasalahan atau sengketa yang dialami oleh masyarakat tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

3. Perusahaan Asuransi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan koreksi bagi Perusahaan asuransi dalam melakukan praktik bisnis terhadap konsumen, untuk meminimalisir terjadinya sengketa dengan konsumen atau masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja tentang bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Dengan menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu

penelitian merupakan ciri khas dan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum.¹⁵ Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁶. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah perkara. Pendekatan dilakukan dengan cara :

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach).

Dimana pendekatan peraturan-undangan ini (statute approach) ini diterapkan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan oleh penulis, antara lain:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 60.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*(suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 13-14.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- 8) Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;
- 9) POJK Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian penulis menggunakan putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr Dan Putusan Mahkamah Agung No 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Yang didapat dari dokumen resmi negara.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research), yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, dan kamus. Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian mencatat bagian yang memuat tentang penelitian. Penelitian kepustakaan ini akan penulis lakukan pada:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III;
- b. Situs-situs internet Sesuai dengan yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;

- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 7) Keputusan Menperindag Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- 8) POJK Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan.
- 9) Putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr;
- 10) Putusan Mahkamah Agung No 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana Hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Dalam penelitian penulis akan mengkaji tentang putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, melakukan pengkajian dari beberapa sumber yang berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr Dan Putusan Mahkamah Agung No 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Yang didapat dari dokumen resmi negara.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dari beberapa sumber data kepustakaan (Library Research) yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr Dan Putusan Mahkamah Agung No 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

G. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah keseluruhan bahan hukum telah terkumpul kemudian penulis akan memulai menganalisis permasalahan hukum yang diatur didalam Perundang-undangan dan putusan pengadilan akan dikaji dan dianalisis dengan kaidah-kaidah dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan ini, agar dapat menjawab permasalahan dengan ilmiah, obyektif, komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memfokuskan analisa tersebut, norma-norma dan teori-teori yang harus diutamakan ialah yang berkaitan langsung dengan kewenangan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dalam memeriksa dan mengadili perkara penolakan klaim asuransi.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam empat bab yang didalamnya terdiri dari sub bab sub bab, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi penulis mengangkat judul tersebut serta berisi gambaran permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu juga sebagai pengantar dalam memahami penulisan penelitian ini, yang keseluruhannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang meneliti bidang topik yang kurang lebih sama meneliti tentang Kewenangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dalam

memeriksa dan mengadili perkara penolakan klaim asuransi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta menguraikan metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

